



Ekspresi Harmoni Sosial Politik Melalui Komunikasi Gender di Indonesia

Muhdlar Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Hamidy

muhdlarabdullah91@gmail.com

Artikel history

Received: 07-06-2024

Received in revised from

Accepted: 11-11-2024

Keywords: social, political, gender communication

Abstract: *This research aims to explore how gender communication can play a role in creating socio-political harmony in Indonesia, as well as reducing socio-political inequality between genders. This research uses an interpretative qualitative approach to explore expressions of socio-political harmony through gender communication in Indonesia. This research uses gender communication theory developed by researchers such as Deborah Tannen and Judith Butler. The findings and discussion in this research show that the role of gender communication in strengthening social integration in Indonesia can be seen through two main perspectives. Deborah Tannen's perspective underlines the importance of understanding the differences in communication styles between men and women, which can help reduce misunderstandings and increase cooperation. Meanwhile, Judith Butler's perspective highlights how gender communication can break down social norms that limit gender identity and expression, paving the way for a more inclusive and equal society. Both theories, when applied in the Indonesian socio-political context, have great potential to strengthen social integration, reduce gender inequality, and create a more just and harmonious society.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana komunikasi gender dapat berperan dalam menciptakan harmoni sosial politik di Indonesia, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial politik antar gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menggali ekspresi harmoni sosial politik melalui komunikasi gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi gender yang dikembangkan oleh peneliti seperti Deborah Tannen dan Judith Butler. Adapun temuan dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran komunikasi gender dalam memperkuat integrasi sosial di Indonesia dapat dilihat melalui dua perspektif utama. Perspektif Deborah Tannen menggarisbawahi pentingnya memahami perbedaan gaya komunikasi antara pria dan wanita, yang bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Sementara itu, perspektif Judith Butler menyoroti bagaimana komunikasi gender dapat meruntuhkan norma sosial yang membatasi identitas dan ekspresi gender, membuka jalan bagi masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Kedua teori ini, ketika diterapkan dalam konteks sosial-politik Indonesia, memiliki potensi besar untuk memperkuat integrasi sosial, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, agama, dan gender, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan harmoni sosial politik yang inklusif dan adil. Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti kebijakan afirmatif dalam politik, ketidaksetaraan gender masih sangat terasa dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu fenomena yang menonjol dalam konteks ini adalah adanya kekerasan verbal dan non-verbal dalam ekspresi sosial politik yang dipicu oleh perbedaan pandangan terutama terkait dengan peran dan posisi gender dalam masyarakat (Basu: 2021). Selain itu, fenomena komunikasi politik yang bias gender memperburuk ketidaksetaraan ini, menciptakan hambatan bagi terciptanya integrasi sosial yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana komunikasi gender dapat berperan dalam menciptakan harmoni sosial politik di Indonesia, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial politik antar gender.

Kekerasan verbal dan non-verbal dalam konteks sosial politik di Indonesia menjadi salah satu isu utama yang mengancam terciptanya keharmonisan sosial politik. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk ucapan, penghinaan, dan simbol-simbol yang merendahkan kelompok atau individu berdasarkan identitas sosial tanpa terkecuali gender (Prasetyo: 2022). Fenomena kekerasan verbal dapat dilihat dalam berbagai bentuk ujaran kebencian, fitnah, dan stereotip yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang dianggap berbeda, baik dalam hal suku, agama, maupun gender. Kekerasan verbal sering kali terjadi dalam arena politik, di mana lawan politik atau kelompok tertentu menggunakan kata-kata untuk merendahkan atau mengintimidasi pihak lain. Dalam hal ini, perempuan yang terlibat dalam politik atau berpendapat sering kali menjadi sasaran utama. Misalnya, perempuan politikus seringkali digambarkan dengan cara yang merendahkan seperti menggunakan bahasa seksis atau menyebut mereka dengan istilah-istilah yang berfokus pada penampilan fisik atau peran domestiknya daripada menghargai kemampuan intelektual atau kontribusi politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam konteks sosial politik telah menjadi alat untuk menundukkan perempuan dan memarginalkan suara mereka dalam politik (Gunawan & Alfianto: 2023).

Selain kekerasan verbal, kekerasan non-verbal juga memiliki dampak yang signifikan dalam memperburuk ketidaksetaraan gender dalam politik. Kekerasan non-verbal ini bisa berupa tindakan fisik, ancaman, atau bahkan pengabaian terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik. Sebagai contoh, perempuan yang terlibat dalam demonstrasi atau aksi politik sering kali menjadi sasaran ancaman fisik atau intimidasi dari kelompok yang tidak setuju dengan pandangan mereka. Ancaman-ancaman ini tidak hanya datang dari individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat berasal dari institusi atau pihak berwenang yang memiliki kekuasaan untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan. Fenomena ini juga terkait dengan cara tubuh perempuan dipandang dalam ranah politik. Seringkali, tubuh perempuan menjadi objek seksual yang dieksploitasi dalam kampanye politik, baik dalam media massa maupun dalam interaksi sosial politik lainnya. Penggambaran perempuan dalam media politik yang cenderung mengobjektifikasi mereka menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang melekat dalam komunikasi politik yang bias gender (Pratama & Santosa: 2022). Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam politik dilihat lebih sebagai simbol visual atau objek untuk meraih perhatian daripada agen perubahan yang memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan.

Komunikasi politik bias gender adalah fenomena yang sangat mencolok di Indonesia, di mana politik sering kali dibentuk oleh perspektif gender yang patriarkal dan seksis. Media, partai politik, dan lembaga-lembaga negara sering kali menggunakan komunikasi bias gender yang memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Bias gender ini dapat ditemukan dalam cara media memberitakan

perempuan yang terlibat dalam politik serta dalam cara pesan-pesan politik disampaikan kepada publik. Salah satu contoh bias gender dalam komunikasi politik adalah rendahnya representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan politik. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat terbatas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam politik sering kali dipandang hanya sebagai pelengkap atau simbol, bukan sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin (Widiyanto: 2023). Media juga sering kali memperlakukan perempuan politikus dengan cara yang seksis, lebih menyoroti penampilan fisik mereka atau kehidupan pribadi mereka daripada prestasi dan kontribusi mereka di dunia politik. Ini menciptakan kesenjangan dalam cara perempuan dan laki-laki dipandang dalam konteks politik sekaligus menghalangi terwujudnya representasi politik yang lebih setara (Haryanto: 2020).

Komunikasi politik bias gender ini juga terjadi dalam cara-cara partai politik dan calon legislatif mengkampanyekan diri mereka. Seringkali, kampanye politik yang melibatkan perempuan lebih berfokus pada citra feminin dan penampilan daripada pada isu-isu substantif yang relevan dengan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya merendahkan peran perempuan dalam politik tetapi juga mengabaikan kapasitas mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih luas (Pratama & Santosa: 2022). Fenomena komunikasi politik bias gender ini juga terwujud dalam retorika politik yang kerap meminggirkan perspektif perempuan dan kelompok minoritas gender. Isu-isu yang diangkat dalam kampanye politik seringkali lebih berfokus pada masalah yang dianggap lebih relevan dengan kepentingan laki-laki, seperti ekonomi atau keamanan, sementara isu-isu yang berkaitan dengan perempuan atau kelompok marginal, seperti hak reproduksi, kesetaraan upah atau kekerasan berbasis gender terkesan diabaikan alias tidak mendapatkan perhatian yang memadai (Haryanto: 2020).

Penelitian ini memiliki keunikan dan kebaruan yang signifikan, karena fokus utamanya adalah pada hubungan antara komunikasi gender dan harmoni sosial politik di Indonesia khususnya dalam konteks kekerasan verbal dan non-verbal serta komunikasi politik bias gender. Meskipun banyak penelitian yang membahas ketidaksetaraan gender dalam politik dan komunikasi gender, sedikit yang mengkaji bagaimana kekerasan verbal dan non-verbal, serta bias gender dalam komunikasi politik, berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial politik yang ada. Keunikan lainnya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang mengintegrasikan teori komunikasi gender dengan kajian sosial politik Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik komunikasi gender di ranah politik, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial politik Indonesia yang sangat beragam, termasuk dalam konteks kekerasan ekspresi sosial politik dan bias gender dalam media politik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana komunikasi gender dapat memperkuat integrasi sosial dan mengurangi ketidaksetaraan sosial politik antar gender.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana komunikasi gender yang inklusif dapat menciptakan ruang yang lebih aman dan adil bagi semua gender untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana komunikasi gender yang sensitif dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan harmoni sosial politik di Indonesia, mengurangi kekerasan verbal dan non-verbal, serta menciptakan kebijakan yang lebih setara. Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat kondisi sosial politik di Indonesia yang masih dipenuhi dengan ketidaksetaraan gender yang signifikan. Fenomena kekerasan verbal dan non-verbal dalam ekspresi sosial politik dan komunikasi politik bias gender menjadi hambatan bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang bagaimana komunikasi gender dapat berperan dalam mengurangi

ketidaksetaraan serta menciptakan ruang sosial politik yang lebih harmonis. Penelitian ini juga relevan dengan kebutuhan akan kebijakan komunikasi yang lebih sensitif terhadap gender, terutama dalam dunia politik yang semakin kompleks. Mengingat pentingnya komunikasi dalam membentuk opini publik dan kebijakan, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam merancang strategi komunikasi yang lebih inklusif dan efektif, baik di tingkat pemerintah, partai politik, maupun media. Dengan memahami peran komunikasi gender dalam memperkuat integrasi sosial politik dan mengurangi kesenjangan sosial politik antar gender, penelitian ini dapat membuka jalan bagi perubahan positif yang mendukung kesetaraan dan keberagaman di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menggali ekspresi harmoni sosial politik melalui komunikasi gender di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti komunikasi gender dalam konteks sosial politik, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif memberi ruang untuk mengungkap makna dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana komunikasi gender mempengaruhi kesetaraan sosial politik dan harmoni sosial dalam masyarakat Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah metode yang mengandalkan bahan referensi yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan, dokumen, dan publikasi terkait lainnya, sebagai sumber utama untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini sangat relevan dengan topik yang dibahas, yaitu analisis komunikasi gender dalam konteks sosial politik di Indonesia, di mana sebagian besar literatur yang berkaitan dengan fenomena ini sudah tersedia dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah. Dengan menggunakan *library research*, peneliti dapat menganalisis berbagai sumber informasi yang ada, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang fenomena komunikasi gender di Indonesia, baik dari sisi teori komunikasi, teori gender, maupun kajian politik dan sosial. Selain itu, *library research* juga memberikan akses ke sumber-sumber primer dan sekunder yang dapat memberikan wawasan mengenai kekerasan verbal dan non-verbal dalam komunikasi sosial politik, serta bias gender dalam komunikasi politik di Indonesia. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada analisis literatur yang berkaitan dengan tiga aspek utama: pertama, komunikasi gender dalam konteks sosial politik Indonesia; kedua, fenomena kekerasan verbal dan non-verbal dalam ekspresi sosial politik; dan ketiga, komunikasi politik bias gender. Sumber-sumber yang akan digunakan antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel berita, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik yang dibahas. Adapaun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang tersedia di pustaka, baik yang berbentuk cetak maupun digital. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian dan pemilihan literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu komunikasi gender, kekerasan dalam ekspresi sosial politik, dan bias gender dalam komunikasi politik di Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan akan meliputi: buku dan artikel ilmiah yang membahas teori-teori komunikasi, komunikasi gender, serta teori sosial dan politik yang relevan; jurnal akademik yang membahas tentang komunikasi politik, gender, serta peran media dalam membentuk pandangan sosial dan politik terkait gender; laporan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender di Indonesia, serta kebijakan politik yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dan kelompok marginal; dan artikel berita yang relevan, terutama yang membahas fenomena kekerasan verbal dan non-verbal dalam ekspresi sosial politik, serta contoh kasus bias gender dalam media dan komunikasi politik di Indonesia. Pengumpulan data melalui penelitian pustaka ini akan dilakukan secara sistematis dengan

memperhatikan kredibilitas sumber serta relevansinya dengan topik penelitian. Peneliti akan menilai kualitas sumber berdasarkan otoritas penulis, tahun publikasi, dan kesesuaian dengan fokus kajian.

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual, serta menghubungkan berbagai fenomena yang ada dalam literatur untuk memahami dinamika komunikasi gender dalam sosial politik Indonesia. Proses analisis data ini melibatkan beberapa langkah. *Pertama*, kategorisasi data. Peneliti akan mengkategorikan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema-tema tersebut meliputi komunikasi gender, kekerasan verbal dan non-verbal dalam ekspresi sosial politik, dan bias gender dalam komunikasi politik. Kategorisasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam data.

Kedua, penarikan tema. Setelah kategori-kategori ditentukan, peneliti akan melakukan proses koding terhadap data, yaitu dengan menandai informasi yang relevan dengan masing-masing kategori. Dalam proses ini, peneliti akan mencari hubungan antara data yang ada dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, serta menggali wawasan baru yang mungkin muncul selama analisis. *Ketiga*, interpretasi data. Setelah data dikodekan, peneliti akan menginterpretasikan makna dari informasi yang ditemukan, menghubungkannya dengan teori yang ada, serta mengidentifikasi temuan-temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses interpretasi ini akan melibatkan penelaahan mendalam terhadap konteks sosial politik Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana komunikasi gender berkontribusi terhadap harmoni sosial politik dan mengurangi ketidaksetaraan antar gender. *Keempat*, pembentukan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, peneliti akan menarik kesimpulan tentang peran komunikasi gender dalam memperkuat integrasi sosial dan politik di Indonesia, serta mengurangi kesenjangan sosial politik antar gender.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi gender yang dikembangkan oleh peneliti seperti Deborah Tannen dan Judith Butler. Tannen mengemukakan bahwa komunikasi antara laki-laki dan perempuan seringkali berbentuk "gendered talk", yang dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi di dalam masyarakat (Tannen: 1995). Sementara itu, teori performativitas gender dari Judith Butler menunjukkan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan hasil dari serangkaian tindakan dan komunikasi yang membentuk pemahaman kita tentang gender (Butler: 2004).

TEMUAN DAN PEMBAHSAN

1. Peran Komunikasi Gender dalam Memperkuat Integrasi Sosial di Indonesia

Cara pria dan wanita berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang dibentuk sejak dini. Menurut Tannen, pria dan wanita memiliki tujuan dan gaya komunikasi yang berbeda. Bagi pria, komunikasi cenderung berfokus pada kompetisi, pencapaian, dan penyelesaian masalah. Sedangkan bagi wanita, komunikasi lebih berorientasi pada hubungan, berbagi perasaan, dan menciptakan koneksi emosional. Dalam konteks ini, perbedaan gaya komunikasi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman antara kedua gender dan menghambat terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Namun, di sisi lain, perbedaan komunikasi ini juga bisa berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat integrasi sosial di Indonesia. Misalnya, dengan memahami bahwa pria dan wanita memiliki tujuan komunikasi yang berbeda, kita dapat mendorong saling pengertian dan kerja sama. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana banyak kelompok dengan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, peran komunikasi gender yang empatik dan inklusif sangat penting.

Tannen menunjukkan bahwa dalam kelompok sosial, wanita cenderung berbicara lebih banyak tentang perasaan dan keadaan emosional, yang dapat membuka ruang bagi terciptanya solidaritas dan empati. Di sisi lain, komunikasi pria yang lebih pragmatis dan terfokus pada masalah bisa mendorong tercapainya solusi praktis yang menyelesaikan tantangan sosial dan politik. Dengan mendekatkan dua gaya komunikasi ini, kita bisa menciptakan integrasi sosial yang lebih kuat. Saling memahami perbedaan gaya komunikasi antara pria dan wanita bisa membantu mengatasi kesalahpahaman dan memperkuat kerja sama antar gender. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental dengan struktur patriarkal, mendorong komunikasi yang saling mendengarkan dan menghargai perspektif yang berbeda, sebagaimana dianjurkan oleh Tannen, dapat memperkuat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

Judith Butler mengembangkan teori performativitas gender yang menantang pandangan bahwa identitas gender adalah sesuatu yang tetap atau alami. Menurut Butler, gender bukanlah sesuatu yang ada sejak lahir atau sesuatu yang terpatrit pada tubuh kita, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh serangkaian tindakan dan ucapan yang berulang dalam konteks sosial. Gender, dalam pandangan Butler, merupakan konstruksi sosial yang bisa berubah dan diganggu melalui cara kita berperilaku dan berkomunikasi. Dalam konteks Indonesia, teori Butler memberikan pandangan yang sangat relevan mengenai bagaimana komunikasi gender dapat memperkuat integrasi sosial. Dalam masyarakat Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh norma tradisional tentang peran gender, pemahaman bahwa gender bisa dipersepsikan sebagai konstruksi sosial membuka peluang untuk meruntuhkan norma-norma yang membatasi ekspresi diri dan interaksi sosial. Sebagai contoh, melalui komunikasi yang mengedepankan inklusivitas dan keberagaman dalam identitas gender, kita bisa mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih setara. Misalnya, saat individu mengungkapkan dirinya di luar batasan-batasan gender tradisional, seperti seorang pria yang lebih menunjukkan sisi emosionalnya atau seorang wanita yang lebih mengutamakan kompetensi dalam diskusi publik, mereka sebenarnya sedang menggugah persepsi masyarakat tentang peran dan batasan gender yang kaku.

Dengan demikian, peran komunikasi gender dalam memperkuat integrasi sosial dapat dilihat sebagai suatu proses di mana individu berinteraksi tanpa dibatasi oleh pandangan tradisional tentang maskulinitas atau feminitas. Di Indonesia, hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat merasa dihargai dan memiliki peran yang sama dalam berkontribusi pada masyarakat. Komunikasi gender yang tidak terbatas pada norma-norma yang sudah mapan akan mengarah pada terciptanya ruang sosial yang lebih adil, di mana setiap orang bisa mengekspresikan identitas mereka tanpa takut menghadapi diskriminasi atau marginalisasi.

Mengkombinasikan perspektif Tannen dan Butler dalam memahami komunikasi gender untuk memperkuat integrasi sosial di Indonesia memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya mengatasi perbedaan gaya komunikasi dan meruntuhkan konstruksi sosial yang membatasi peran gender. Setidaknya dua hal mendasar yang dapat diformulasikan dalam kombinasi dua perspektif ini. *Pertama*, pemahaman terhadap perbedaan gaya komunikasi. Perspektif Tannen memberi tahu kita bahwa untuk memperkuat integrasi sosial, kita perlu memahami dan menghargai perbedaan dalam cara pria dan wanita berkomunikasi. Mengembangkan empati dan kesadaran tentang cara-cara pria dan wanita berkomunikasi akan membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi dalam interaksi sehari-hari. Di Indonesia, yang terdiri dari banyak kelompok etnis dan

budaya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan gender akan berkontribusi pada terciptanya iklim sosial yang lebih harmonis.

Kedua, meruntuhkan stereotip gender. Perspektif Butler mendorong kita untuk memahami bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi oleh tindakan dan komunikasi. Dalam konteks integrasi sosial di Indonesia, ini berarti bahwa dengan memperkenalkan dan mempraktikkan komunikasi yang tidak terikat oleh norma gender tradisional, kita dapat membuka ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas mereka secara bebas. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dan politik antara gender, dan mendorong masyarakat untuk menerima keragaman identitas gender sebagai bagian dari kekuatan sosial yang menghubungkan berbagai kelompok.

2. Komunikasi Gender dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Politik Antar Gender di Indonesia

Di Indonesia, kesenjangan sosial-politik antar gender masih menjadi isu yang sangat relevan. Diskriminasi dan stereotip gender sering kali tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di ranah politik dan sosial. Peran komunikasi gender dalam mengurangi kesenjangan ini menjadi krusial, karena komunikasi tidak hanya berfungsi untuk bertukar informasi tetapi juga untuk membangun relasi kekuasaan, identitas, dan kesetaraan. Gaya komunikasi pria dan wanita sering kali dipengaruhi oleh peran sosial dan budaya yang ditetapkan sejak awal kehidupan. Perbedaan ini dapat menciptakan kesalahpahaman antara pria dan wanita, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan sosial dan politik antar gender. Tannen menyoroti bahwa pria cenderung menggunakan bahasa yang lebih langsung, kompetitif, dan berbasis pada pencapaian, sedangkan wanita lebih sering menggunakan bahasa untuk membangun hubungan, menunjukkan empati, dan berbagi perasaan. Dalam konteks politik, perbedaan gaya komunikasi ini sering kali digunakan untuk mempertahankan norma kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki. Misalnya, dalam banyak percakapan politik, pria cenderung berbicara lebih banyak, menyela, dan mendominasi diskusi, sementara wanita sering kali diharapkan untuk lebih bersikap pasif atau hanya menyuarakan pendapat mereka secara terbatas. Namun, pemahaman tentang perbedaan gaya komunikasi ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial-politik antar gender. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan struktur sosial yang masih patriarkal, memahami bahwa gaya komunikasi pria dan wanita berbeda dan bukan berarti salah, dapat mengarah pada lebih banyak kesempatan bagi wanita untuk berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Menghargai perbedaan cara berbicara ini akan mengurangi kecenderungan untuk menilai wanita sebagai kurang kompeten atau kurang berwibawa hanya karena mereka berbicara dengan gaya yang lebih empatik atau kolaboratif.

Dalam dunia politik Indonesia, jika kita mengenali bahwa wanita dan pria memiliki tujuan komunikasi yang berbeda, maka kita dapat menciptakan ruang untuk keduanya berpartisipasi secara setara. Sebagai contoh, wanita yang berbicara dengan cara yang lebih berbasis pada hubungan dan empati bisa memperkenalkan perspektif yang lebih humanistik dalam diskusi politik, sementara pria yang lebih pragmatis dapat lebih terfokus pada pemecahan masalah. Dengan menciptakan ruang yang inklusif bagi kedua gaya komunikasi, maka kesenjangan sosial-politik antar gender dapat berkurang, dan keputusan-keputusan politik bisa lebih mencerminkan keberagaman perspektif.

Butler berpendapat bahwa gender bukanlah identitas yang tetap atau alami, melainkan hasil dari serangkaian tindakan yang dilakukan dalam konteks sosial. Dalam pandangan Butler, gender merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui bahasa, perilaku, dan norma-norma budaya yang diberlakukan oleh masyarakat. Dalam konteks kesenjangan sosial-politik antar gender di Indonesia, teori Butler memberikan perspektif yang berbeda namun sangat relevan. Gender dalam pandangan

Butler bukan sesuatu yang ditentukan sejak lahir, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui "performa" sosial, termasuk komunikasi. Dengan memahami gender sebagai performa sosial, kita dapat melihat bahwa kesenjangan gender dalam politik dan kehidupan sosial bisa dikurangi melalui perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Ini berarti, untuk mengurangi kesenjangan gender, kita perlu mengubah cara kita berbicara tentang gender dan meruntuhkan konstruksi sosial yang membatasi peran-pria dan wanita dalam masyarakat.

Di Indonesia, yang memiliki norma gender yang kental dan sering kali membatasi peran perempuan dalam dunia politik dan publik, teori Butler menawarkan kesempatan untuk merombak struktur sosial ini. Misalnya, jika komunikasi gender diubah menjadi ruang yang lebih inklusif dan memperkenalkan berbagai performa gender yang lebih fleksibel, maka kesenjangan sosial-politik antar gender dapat berkurang. Dengan kata lain, melalui komunikasi yang menyuarakan keberagaman identitas gender, masyarakat dapat bergerak menuju pengakuan dan penerimaan terhadap individu dengan berbagai ekspresi gender. Butler juga menekankan pentingnya untuk "menggangu" norma-norma gender yang ada. Dalam konteks Indonesia, ini bisa berarti bahwa perempuan yang berbicara dengan cara yang lebih ekspresif dan penuh empati, atau pria yang menunjukkan sisi emosionalnya dalam komunikasi politik, dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai peran dan kapasitas mereka. Ketika identitas gender dipandang sebagai performa yang dapat berubah, maka batasan-batasan tradisional tentang peran pria dan wanita dalam politik dan sosial dapat dilampaui, menciptakan masyarakat yang lebih setara.

Penggabungan perspektif Deborah Tannen dan Judith Butler memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana komunikasi gender dapat mengurangi kesenjangan sosial-politik antar gender di Indonesia. Kedua teori ini menekankan pentingnya dua hal. *Pertama*, pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan gaya komunikasi. Perspektif Tannen mengajarkan pentingnya memahami perbedaan cara berbicara antara pria dan wanita dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan sosial. Dalam konteks politik Indonesia, dengan menghargai perbedaan ini, kita bisa mengurangi ketegangan dan membuka kesempatan lebih banyak bagi wanita untuk berpartisipasi dalam percakapan politik yang lebih luas. Ini dapat mengurangi dominasi laki-laki dalam dunia politik dan memberikan ruang bagi wanita untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, meruntuhkan konstruksi sosial gender yang membatasi. Perspektif Butler memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi dapat mengganggu dan meruntuhkan norma-norma gender yang menghambat kesetaraan. Menggunakan komunikasi gender sebagai ruang untuk memperkenalkan identitas gender yang lebih beragam dapat mengurangi kesenjangan gender di Indonesia. Misalnya, dengan memungkinkan perempuan untuk lebih terbuka dan berani berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka dalam politik, atau mengizinkan pria untuk menunjukkan sisi emosional mereka tanpa dihukum atau direndahkan, maka struktur kekuasaan yang ada dapat dipengaruhi dan dipertanyakan.

KESIMPULAN

Peran komunikasi gender dalam memperkuat integrasi sosial di Indonesia dapat dilihat melalui dua perspektif utama. Perspektif Deborah Tannen menggarisbawahi pentingnya memahami perbedaan gaya komunikasi antara pria dan wanita, yang bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Sementara itu, perspektif Judith Butler menyoroti bagaimana komunikasi gender dapat meruntuhkan norma sosial yang membatasi identitas dan ekspresi gender, membuka jalan bagi masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Kedua teori ini, ketika diterapkan dalam konteks sosial-

politik Indonesia, memiliki potensi besar untuk memperkuat integrasi sosial, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Dalam mengurangi kesenjangan sosial-politik antar gender di Indonesia, komunikasi gender memainkan peran penting. Perspektif Deborah Tannen menyoroti pentingnya memahami perbedaan komunikasi antara pria dan wanita sebagai langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan setara, sementara perspektif Judith Butler mengajak kita untuk meruntuhkan konstruksi sosial gender melalui perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat memperkuat integrasi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif.

REFERENSI

- Tannen, D. (1995). "The Power of Talk: Gender and Discourse in the Workplace." *Journal of Language and Social Psychology*, 14(1), 17-43.
- Butler, J. (2004). "Undoing Gender: Normativity and Gendered Violence." *Studies in Gender and Sexuality*, 5(3), 231-248.
- Basu, A. (2021). "Gender, Politics, and Representation in Indonesia: A Case Study of Female Political Leadership." *Asian Journal of Women's Studies*, 27(4), 451-466.
- Pratama, A., & Santosa, H. (2022). "Gendered Political Discourse in Indonesia: An Analysis of Political Speeches During Elections." *Indonesian Journal of Political Communication*, 8(1), 45-60.
- Haryanto, Y. (2020). "Gender, Language, and Politics in Indonesia: A Critical Discourse Analysis of Parliamentary Debates." *Journal of Language and Politics*, 19(2), 220-239.
- Widiyanto, T., & Sari, D. (2023). "Perempuan dan Politik di Indonesia: Mengkaji Peran Gender dalam Wacana Politik Kontemporer." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 13(2), 134-150.
- Gunawan, F., & Alfianto, M. (2023). "The Intersection of Gender and Politics: A Feminist Analysis of Indonesian Political Discourse." *Journal of Feminist Studies in Communication*, 29(1), 1-20.
- Putri, M. D., & Prasetyo, A. (2022). "Politics of Gender in Indonesia: A Case Study of Female Political Candidates in the 2019 Indonesian General Election." *International Journal of Political Science and Gender Studies*, 6(3), 58-75.